

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. (Wedan 2016)

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki penduduk ratusan juta jiwa. Indonesia juga adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut sebuah perhitungan manusia Muslim Indonesia adalah jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, maka penduduk Muslim Indonesia dari segi jumlah tidak ada yang menandingi. Jumlah yang besar tersebut sebenarnya merupakan sumber daya manusia dan kekuatan yang sangat besar bila mampu dioptimalkan peran dan kualitasnya. Jumlah yang sangat besar tersebut juga mampu menjadi kekuatan sumber ekonomi yang luar biasa. Jumlah yang besar di atas juga akan menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan dalam

percaturan nasional. Telah diketahui bahwa usaha pendidikan Islam sama tujuannya dengan Islam itu sendiri dan pendidikan Islam tidak terlepas dari sejarah Islam pada umumnya (Rahman,Nisa 2015).

Pesantren yang diakui sebagai model pendidikan awal islam di Indonesia sampai saat ini masih eksis dan mampu mempertahankan kredibilitasnya di masyarakat. Adanya pendidikan islam menjadi suatu kewajiban dan kebutuhan bagi kaum muslim untuk menimba ilmu agama sebanyak-banyaknya di dunia pesantren. Pondok pesantren, merupakan lembaga pendidikan islam yang berperan dalam mengembangkan dan melestarikan ajaran islam di Indonesia waktu itu.Tercatat pada abad ke-19, pondok pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat yang didirikan oleh ulama-ulama *independent*. Dan pondok pesantren saat itu menjadi pusat perjuangan kaum nasionalis-pribumi. Banyak juga petentangan dan perlawanan kaum colonial terhadap dunia pesantren.Hanya sedikit sekali yang diketahui tentang perkembangan pesantren pada masa lalu, terutama sebelum Indonesia dijajah Belanda, karena dokumentasi sejarah sangat kurang. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, bukan karena keeksistensinya yang sudah sangat lama, tetapi karena kultur, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut (Aswad, Oliv El 2015).

Selanjutnya Aswad, Oliv El (2015) menyatakan bahwa C. Geertz menyebutkan sebagai *subkultur* masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, karena di Jawa sangat banyak pondok-pondok yang didirikan, baik pondok pesantren yang santriwan dan santriwatinya sedikit bahkan santri yang sudah sangat banyak. Walaupun demikian, peran pesantren saat ini boleh dikatakan terbatas, karena pengelolaannya dan fasilitasnya juga apa adanya. Pengelolaan yang apa adanya terlihat dari kurikulum sebagian pesantren yang belum dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, akibatnya banyak alumni pondok pesantren yang gagap teknologi terutama pada pondok pesantren yang salafiyah. Akan tetapi, sekarang kebanyakan pesantren melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus, baik dalam segi manajemen, kurikulum maupun fasilitas agar supaya menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot. Saat ini, juga sudah banyak pesantren yang telah menjadi model dari lembaga pendidikan yang *leading*. Meski ada kelemahan pondok pesantren,

tetapi dalam pendidikan di pondok pesantren mengajarkan tentang akhlakul kharimah, adab-adab, *andhap ashor*, ketawadhu'an yang sangat baik bagi perkembangan karakter santri.

Menyatakan bahwa, Pondok Pesantren berperan dalam sistem penyelenggaraan yaitu, manajemen sebagai faktor Upaya, organisasi sebagai faktor Sarana, dan administrasi sebagai faktor karsa. Ketiga faktor ini memberi arah dan perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pondok Pesantren masing-masing. Dalam pengelolaan Pondok sebagai suatu lembaga Pendidikan, peran Kyai sangat besar dalam menentukan tujuan dan kegiatan yang harus dilakukan. Keadaan ini telah menjadikan hampir seluruh pengelolaan sumberdaya baik fisik ataupun finansial banyak ditangani langsung oleh Kyai atau oleh Keluarga Kyai dengan bantuan Santri yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan keseharian dan pendidikan Pondok Pesantren. Secara umum, kepengurusan dalam Pesantren terdiri dari kyai, guru/ustadz, pengurus Pondok Pesantren, pimpinan unit-unit kegiatan dan tenaga kesekretariatan Pondok Pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga yang telah diakui oleh pemerintah. Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan Pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas masyarakat muslim,. Karena kelahiran Undang-undang ini masih amat belia dan belum familiar dikalangan Pesantren di Indonesia. Keistimewaan Pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-undang Sisdiknas sebagai berikut: Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di Pesantren. (Imam Syafii, 2018)

Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Sehingga format Pesantren kedepan haruslah mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain dengan menata kembali manajemen yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Kita menyadari bahwa di banyak Pesantren masalah keuangan selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas Pesantren, baik yang berkaitan dengan anggaran, akuntansi, penataan administrasi, alokasi serta kebutuhan pengembangan Pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian Pesantren. Tidak sedikit Pesantren yang memiliki sumberdaya baik manusia maupun alamnya tidak tertata dengan rapi, dan tidak sedikit pula proses pendidikan Pesantren berjalan lambat karena kesalahan dalam penataan manajemen keuangannya (M.Pd.I 2018).

(Azmi 2019) menyatakan bahwa, Pondok pesantren merupakan entitas nirlaba dan memiliki peran yang penting dalam perkembangan kemajuan di Indonesia dengan dibuktikan lahirnya para ilmuwan, pejuang, pemimpin, birokrat, dan lainnya. Keuangan pondok pesantren relatif besar nilainya, bahkan sebagian aset besar pondok pesantren adalah wakaf permanen berupa tanah.

Organisasi nirlaba secara mudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Walaupun dalam perjalanannya ia membutuhkan dana yang diperoleh dari kegiatan bisnis, hal ini tetap berarti bahwa kegiatan bisnis hanya untuk perolehan dana saja bukan kegiatan utama yayasan (IAI,2015)

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan (IAI, 2015)

Rahmi (2014) berpendapat bahwa laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi. Standar berfungsi untuk memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan antar- entitas menjadi lebih seragam. Standar akuntansi yang berisikan pedoman penyusunan laporan keuangan berfungsi salah satunya agar dalam penyajian laporan keuangan seragam sehingga dapat memudahkan pemakai dalam membaca dan menganalisis serta menyediakan laporan keuangan yang berkualitas. Jika laporan keuangan disusun tidak berdasarkan standard an prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta akan menyesatkan penggunaannya. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disampaikan maka akan semakin menyakinkan terhadap kinerja entitas tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pesantren merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap sistem Akuntabilitas Pondok Pesantren. Kementerian Agama, Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia bekerjasama dan menghasilkan pedoman akuntansi pesantren dan beberapa standar akuntansi yang relevan. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi pionir peningkatan akuntabilitas pesantren terhadap publik . Lebih lanjut, pesantren yang berbadan hukum yayasan mengharuskan mereka untuk patuh pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) . Kemudian, terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 revisi 2010 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba membantu pesantren untuk memahami dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menginisiasi penyusunan panduan akuntansi pondok pesantren supaya pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari pondok pesantren. Pedoman akuntansi ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Komponen laporan keuangan Pondok Pesantren Berdasarkan

Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Berdasarkan PSAK 45 Pada Pondok Pesantren Darul Hikam Puri Mojokerto”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diambil sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penyusunan laporan keuangan di Pondok Pesantren Darul Hikam Puri Mojokerto sudah menerapkan Akuntansi Pesantren?
2. Bagaimana cara agar Pedoman Akuntansi Pesantren bisa diterapkan di Pondok Pesantren Darul Hikam Puri Mojokerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sudah tidaknya PondokPesantren Darul Hikam Puri Mojokerto membuat laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Agar Pondok Pesantren Darul Hikam Puri Mojokerto bisa menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren sesuai dengan aturan pemerintah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pencatatan laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi pondok pesantren.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikat manfaat sebagai bahan referensi guna penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis

- a. Bagi donator, sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal dan eksternal Pondok Pesantren Darul Hikam Puri Mojokerto agar mempermudah dalam mengambil keputusan.
- b. Bagi Pondok Pesantren Darul Hikam Puri Mojokerto, sebagai indikator dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren agar tercipta pengelolaannya dengan baik.